

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Desa Tarumajaya telah siap untuk mengembangkan desa wisata secara professional, mengingat Desa Wisata telah termasuk dalam kategori Desa Wisata Berkembang fase awal berdasarkan penilaian Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2022. Kategori tersebut merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan sejumlah standar kriteria yang ditetapkan. Penetapan tersebut membuka peluang bagi Desa Tarumajaya untuk mendapatkan dukungan program dan kegiatan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD terkait) maupun investasi dunia usaha.
2. Secara kelembagaan, Desa Tarumajaya berpotensi untuk mengembangkan diri sebagai desa wisata maju, dengan sejumlah potensi yang dimiliki, antara lain:
 - a. Modal sosial yang kuat diwujudkan dengan hubungan kekerabatan antar warga dan solidaritas sosial yang tinggi untuk melaksanakan program-program layanan dasar dan kelestarian lingkungan seperti Kelompok Pemelihara Sistem Penyediaan Air Minum (KP SPAM) yang dikelola secara mandiri dari sumber-sumber mata air untuk disalurkan ke warga desa yang membutuhkan, menyelenggarakan event tahunan Hari Air, mengurangi angka stunting, melakukan

- penanaman kembali dalam program perhutanan sosial, kewajiban menanam pohon bagi setiap warga yang melangsungkan pernikahan, pengolahan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu-Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Citarum Harum Lembangsari dan inisiasi untuk mengembangkan potensi wisata alam Pegunungan Wah Yang secara gotong royong
- b. Lembaga-lembaga desa yang aktif dalam pembangunan desa yang digerakkan oleh sejumlah sumberdaya manusia yang memiliki atensi besar dalam pengelolaan desa wisata berbasis potensi desa, antara lain BUM Desa, PKK, Karang Taruna, lembaga agama dan pionir-pionir Pokdarwis meskipun belum memiliki anggota.
 - c. Pola hubungan antar lembaga kemasyarakatan desa cukup solid, interaktif dan menghasilkan rasa saling percaya (*trust*) sehingga dalam pelaksanaan pembangunan lembaga-lembaga tersebut selalu saling membantu dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan (*mutualism*) penuh tanggung jawab (resiprositas), misalnya pada saat menghadapi pandemic Covid-19, pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, bantuan sosial maupun program literasi desa yang membuahkan hasil berupa penghargaan pemanfaatan perpustakaan terbaik tingkat kabupaten Bandung sebagai penanda terrealisasinya program literasi desa.
 - d. Lembaga-lembaga di Desa Tarumajaya telah terintegrasi dan bahu-membahu, membantu mempromosikan potensi Desa Tarumajaya termasuk program-program wisata kepada masyarakat. Integrasi

- antar lembaga mampu membangun sinkronisasi program/kegiatan antar lembaga sehingga Desa Tarumajaya mendapatkan penghargaan desa terbaik tingkat Kabupaten Bandung dalam menjalankan gotong royong tingkat kabupaten Bandung (Gotong-Royong Award).
- e. Potensi Sumberdaya alam yang telah dirintis untuk dikembangkan dengan pembangunan amenitas antara lain di lokasi wisata Bukit Paesan, Wisata Air Situ Cisanti di kilometer 0 Sungai Citarum, Wisata Bukit Pinus Pakawa, Wisata rintisan Curug (Air Terjun), Wisata Camping Ground AGV dan outbound, serta wisata agro petik strawberry.

B. Rekomendasi

Kelembagaan Desa Tarumajaya telah memiliki modal sosial yang kuat yang meningkatkan integritas masing-masing lembaga yang pada gilirannya melahirkan kepercayaan (trust) dari pihak luar desa untuk menjalankan program-program pembangunan dalam skala kabupaten, provinsi maupun nasional. Kekuatan ini telah mampu menggerakkan lembaga-lembaga desa dan para pokdarwis dalam pengembangan desa wisata melalui optimalisasi lokasi-lokasi wisata berkelanjutan yang terdiri dari empat kategori, yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan. Adapun aspek-aspek yang perlu ditingkatkan secara umum antara lain:

1. Gagasan pembentukan kelembagaan Pengelola Desa Wisata (PDW) merupakan ide brilian untuk membangun kolaborasi antar lembaga dalam manajemen desa wisata komprehensif yang perlu dilegalkan dalam Peraturan Desa agar dapat segera direalisasikan.
2. Perlu peningkatan kapasitas dengan cara melakukan suatu pelatihan sumberdaya manusia terkait dengan skills yang diberikan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung bagi para pionir Pokdarwis yang masih bekerja sendiri-sendiri dalam mengelola potensi dan lokasi wisata karena belum memiliki anggota hal ini guna untuk meningkatkan suatu kemampuan yang dimiliki mereka selain itu saja. Perekrutan anggota menjadi prasyarat mutlak dalam pembentukan kelompok, sehingga tugas dan fungsi dapat dibagi dalam job deskripsi secara lebih baik sehingga pengembangan desa wisata pada destinasi yang ditentukan dapat bergerak lebih cepat.
3. Revitalisasi BUM Desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata pada unit usaha wisata desa, baik aspek afektif, kognitif, psychomotoric (skill), dalam bidang/program : 1) Manajemen Destinasi wisata, 2) Manajemen Keuangan Destinasi Wisata, 3) Pembangunan Amenitas didukung oleh Pemerintah Daerah dan Investor dari Dunia Usaha dan Akademisi, 4) Pengembangan jejaring kemitraan dengan Pemda, Akademisi dan Dunia Usaha, 5) Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal memfasilitasi para pengunjung/wisatawan melalui pemandu wisata (tour guide), 6) promosi destinasi wisata, dan 7) branding destinasi

wisata beserta produk-produk tematiknya seperti wisata edukasi, wisata konservasi, wisata alam paralayang dan agrowisata.

Peneliti memberikan rekomendasi pada 9 (Sembilan) Pendekatan (*Approach*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kelembagaan oleh Max Weber (2005) yaitu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa Tarumajaya:

1. Rekomendasi berkaitan dengan Hierarki atau struktur kelembagaan:

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) membuat suatu pelatihan mengenai Struktur Lembaga dimana dalam pelatihan ini akan memberikan pembelajaran Mengenai dengan Struktur Lembaga: Job Desain suatu kelembagaan. Struktur Lembaga disini maksudnya yaitu dari aspek pengaturan tataan yang didalamnya ada aspek berkaitan dengan tugas-tugas atau tanggung jawab, fungsi, peran yang akan diberikan, beserta dengan strategi apa yang digunakan guna mencapai tujuan pengembangan desa wisata mandiri. sebaiknya pemerintahan desa juga membantu membuat Model Kelembagaaan untuk pokdarwis yang artinya didalam model ini harus memiliki suatu misi tertentu terkait dengan *problem prevention*.

2. Rekomendasi berkaitan dengan Aturan-aturan formal dan regulasi pemerintah:

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebaiknya dimasukan segera kedalam aturan-aturan ataupun regulasi yang ada sehingga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dapat tertata dengan baik. Tidak hanya itu saja dengan adanya Aturan dan regulasi yang jelas ini juga dapat membantu dalam peningkatan kapasitas lembaga Pokdarwis.

3. Rekomendasi Dokumen Tertulis terkait dengan kebijakan:

- a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebaiknya pokdarwis segera membicarakan terkait dengan kebijakan karena dengan adanya kebijakan ini hak dari setiap anggota Pokdarwis dapat terjaga dan terlindungi tidak hanya itu saja ini juga dapat membantu Pokdarwis dalam mengambil suatu keputusan dengan efisien dan juga mewujudkan suatu kenyamanan. Kemudian itu membuat Standar Prosedur Operasional (SOP) sehingga jika munculnya sebuah masalah di dalam lembaga sudah ada sebuah landasan yang dapat mengatasi hal tersebut dan juga sebagai acuan untuk setiap anggota yang ada dalam melaksanakan tugas-tugas.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) direkomendasikan untuk menambahkan *problem prevention* yang tegas didalam Standard Prosedur Operasional selain ini dapat mengantisipasi suatu permasalahan dari pihak internal hal ini juga dapat mengantisipasi permasalahan yang muncul dari pihak Ekternal contoh permasalahan ekternal kurangnya kesadaran dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan, kurangnya time management pengurus lembaga melaksanakan tugas yang diberikan dan lainnya,

dan dikarenakan masih ada beberapa hal yang kurang di dalam Standard Operasional Prosedur jadi direkomendasikan untuk Membuat pelatihan terkait penyusunan Standard Operasional Prosedur. Dan pelaksana

- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) direkomendasikan untuk membuat dokumen tertulis terkait dengan kebijakan tertulis disamping dari suatu kebijakan yang tidak tertulis atau yang sudah menjadi aturan dan kearifan lokal masyarakat karena ini menjadi patokan dari keaktifan suatu kelembagaan masyarakat didalamnya kemudian juga membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) Didalam berisikan Jam kerja, adanya tujuan lembaga berdasarkan dari data lembaga, Prinsip kerja, Parameter penilaian keaktifan setiap anggota, Alur kerja lembaga berdasarkan pada data observasi individu, Hak, Aturan berkaitan dengan larangan, Sanksi, Prosedur pemberentian anggota lembaga jika melakukan suatu pelanggaran, Daftar nominal kompensasi yang diberikan untuk anggota berdasarkan pada kategori (Jabatan, Daerah, provinsi, antar provinsi,), tata cara pengelohan keuangan lembaga. tetapi sebaiknya sebelum membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) yang tetap sebaiknya dilakukan uji coba guna menghasilkan suatu evaluasi sehingga jika terdapat hal yang tidak cocok ini dapat di Atasi langsung dan tidak perlu merombak kembali. Pelaksana Pemerintahan Desa membuat suatu pelatihan dari Lembaga Pelatihan Standard Operasional Prosedur seperti bmd *Street Consulting* dari PT. Bisa Mandiri

- d. Karang Taruna direkomendasikan untuk membuat Pelatihan mengenai Standard Prosedur Operasional (SOP) dan Membuat dokumen tertulis terkait dengan membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) disamping dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Didalam berisikan Jam kerja, adanya tujuan lembaga berdasarkan dari data lembaga, Prinsip kerja, Parameter penilaian keaktifan setiap anggota, Alur kerja lembaga berdasarkan pada data observasi individu, Hak, Aturan berkaitan dengan larangan, Sanksi, Prosedur pemberentian anggota lembaga jika melakukan suatu pelanggaran, Daftar nominal kompensasi yang diberikan untuk anggota berdasarkan pada kategori (Jabatan, Daerah, provinsi, antar provinsi,), tata cara pengelohan keuangan lembaga. tetapi sebaiknya sebelum membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) yang tetap sebaiknya dilakukan uji coba guna menghasilkan suatu evaluasi sehingga jika terdapat hal yang tidak cocok ini dapat di Atasi langsung dan tidak perlu merombak kembali. Pelaksana Pemerintah Desa, Lembaga Pelatihan Standard Operasional Prosedur seperti BMD Street Consulting dari PT.Bisa Mandiri
- e. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga direkomendasikan membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) tetap diluar dari program kerja (pokja) bulanan yang dilaksankn oleh lembaga PKK. Di dalam Standard Prosedur Operasional (SOP) berisikan Jam kerja, adanya tujuan lembaga berdasarkan dari data

lembaga, Prinsip kerja, Parameter penilaian keaktifan setiap anggota, Alur kerja lembaga berdasarkan pada data observasi individu, Hak, Aturan berkaitan dengan larangan, Sanksi, Prosedur pemberentian anggota lembaga jika melakukan suatu pelanggaran, Daftar nominal kompensasi yang diberikan untuk anggota berdasarkan pada kategori (Jabatan, Daerah, provinsi, antar provinsi,), tata cara pengelohan keuangan lembaga. tetapi sebaiknya sebelum membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) yang tetap sebaiknya dilakukan uji coba guna menghasilkan suatu evaluasi sehingga jika terdapat hal yang tidak cocok ini dapat di Atasi langsung dan tidak perlu merombak kembali.

4. Rekomendasi *Specialization* suatu pembagian kerja secara formal dituangkan dalam birokrasi dengan jabatan yang diatur berdasarkan pokok-pokok tugas yang dibebankan:

- a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) direkomendasikan membuat susunan atau tataan terkait dengan pokok-pokok tugas dibebankann sesuai dengan struktur lembaga pokdarwis, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, Standard Operasional prosedur (SOP) yang nantinya sudah dibuat oleh tim penyusun dan kebijakan.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam bagian ini sudah sesuai dengan konsep yang digunakan dimana suatu pembagian kerja secara formal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tarumjaya lengkap dituangkan dalam Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam ART sendiri di tuangkan mengenai Ketentuan umum,

- Mengenai Anggota beserta kewajiban, Mulai dari Sistem, Besaran Gaji dan tunjangan, Tata cara pengangkatan dan pemberentian anggota, Tata laksanakan kerja anggota, hingga hari libur kemudian untuk Anggaran Dasar (AD) dituangkan mengenai Nama dan tempat kedudukan lembaga BUM Desa, Maksud dan Tujuan, Jenis usaha yang diurus langsung oleh BUM Desa, Organisasi BUM Desa beserta dengan pelaksanaannya, Modal, Aset dan Pinjaman, Kerjasama, Ketentuan Pokok pembagian dan pemanfaatan serta penutup mengenai ketentuan berlakunya Anggaran dasar.
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) direkomendasikan membuat susunan atau tataan terkait dengan pokok-pokok tugas dibebankan sesuai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, Standard Operasional prosedur (SOP) yang nantinya dibuat oleh tim penyusun.
 - d. Karang Taruna direkomendasikan untuk membuat susunan atau tataan tertulis terkait dengan pokok-pokok tugas dibebankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa yang dibuat oleh Kepala Desa, kemudian itu sesuai dengan Standard Operasional prosedur (SOP) yang nantinya dibuat oleh tim penyusun.
 - e. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dalam bagian lembaga ini sudah sesuai dengan konsep yang digunakan dimana suatu pembagian kerja dibagi berdasarkan dari Program Kerja atau Pokja yaitu Gotong , Pendidikan, Ketrampilan, Pangan, Sandang, Kesehatan, dan Kelestarian Lingkungan. Rekomendasi yang diberikan untuk lembaga ini yaitu sebaiknya TP.PKK masuk juga dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa agar tertuang dengan jelas kemudian itu juga menyesuaikan dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang nanti dibuat.

5. Rekomendasi mengenai Technical Knowledge penempatan anggota yang ada didalam lembaga masyarakat memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan klasifikasi yang dibuat:

- a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) direkomendasikan membuat suatu pelatihan dan pembinaan mengenai pengetahuan teknis pengelolaan lembaga oleh pemerintahan desa, Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung, Lembaga Pelatihan dan pusat seperti dari Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Pariwisata. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan suatu kemampuan pengetahuan pengelolaan lembaga. Hal ini dikarenakan kelembagaan masih dalam proses pembentukan secara jelas oleh pemerintahan desa sehingga penempatan kerja masih belum terlihat dengan jelas dan juga berdasark dari hasil yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia .
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) direkomendasikan untuk menyesuaikan kembali dengan kualifikasi pemenuhan posisi jabatan tertentu didalam lembaga masyarakat disamping dari pemberdayaan dan kemauan kenapa demikian, agar lebih jelas dan tertata dan membuat suatu pelatihan lembaga kemasyarakatan
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah sesuai kualifikasi karena sebelum ditempatkan di posisi tertentu setiap anggota dilakukan sebuah observasi. Tetapi sayangnya MUI belum termasuk dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, dan belum memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP). Jadi direkomendasikan sebaiknya nanti menyesuaikan kembali dengan Standar Operasional Prosedur.

- d. Karang Taruna direkomendasikan membuat Pelatihan dan pembinaan mengenai pengetahuan teknis pengelolaan lembaga oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini dikarenakan kelembagaan masih memegang bahwa kualifikasi pengetahuan teknis anggota masih dilihat dari latar belakang dan kebiasaan anggota.
- e. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga direkomendasikan pelatihan lembaga kemasyarakatan, Pelatihan dan pembinaan mengenai pengetahuan teknis pengelolaan lembaga. Sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Jawa Barat .kemudian untuk menyesuaikan kembali dengan kualifikasi pemenuhan posisi jabatan tertentu didalam lembaga masyarakat dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Standard Operasional Prosedur.

6. Rekomendasi Mengenai Impersonality suatu tolak ukur anggota organisasi atau Lembaga masyarakat apakah mengikuti ketentuan prosedur dan kebijakan yang sudah dibuat:

- a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dikarenakan pokdarwis masih dalam proses penyusunan prosedur tugs sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa yang dibuat oleh Kepala Desa, kemudian itu sesuai dengan Standard Operasional prosedur (SOP)

- yang nantinya dibuat oleh tim penyusun. Maka dari itu rekomendasikan yaitu membuat suatu pembinaan dan pelatihan peningkatan kerja dalam lembaga pokdarwis sehingga setiap anggota dapat bekerja sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas kerja, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemerintah pusat.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) direkomendasikan membuat suatu Pelatihan terkait dengan Produktivitas Kerja dalam lembaga sehingga setiap anggota bisa lebih aktif, meningkatnya suatu produktivitas anggota, kualitas kerja menjadi lebih baik dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap Keterampilan anggota, Keterampilan *Director* dan *maneger* unit. Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas kerja, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemerintah pusat.
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) direkomendasikan membuat suatu Pelatihan terkait dengan Produktivitas Kerja dalam lembaga sehingga setiap anggota bisa lebih aktif, meningkatnya suatu produktivitas anggota, kualitas kerja menjadi lebih baik dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap Keterampilan anggota, Keterampilan Ketua. Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan Produktivitas Kerja, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemerintah pusat.

- d. Karang Taruna dalam bagian direkomendasikan pelatihan terkait dengan Produktivitas Kerja dalam lembaga sehingga setiap anggota bisa lebih aktif, meningkatnya suatu produktivitas anggota, kualitas kerja menjadi lebih baik dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap Keterampilan anggota, Keterampilan Ketua.

Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan Produktivitas Kerja, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat

- e. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga direkomendasikan suatu pelatihan peningkatan produktivitas lembaga .

Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas, Pemerintah Daerah seperti Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, dan Pemerintah pusat seperti langsung dari Kementrian Kesehatan

7. Rekomendasi Mengenai Career Employment peningkatan karir melalui promosi didasari dari *seniority, job performance, or increase training*:

- a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) direkomendasikan membuat suatu pembinaan dan pelatihan peningkatan karir dalam lembaga sehingga setiap anggota mendapatkan pengetahuan yang lebih jauh. Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan karir, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemerintah pusat.

- b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) direkomendasikan membuat suatu pelatihan peningkatan karir dalam lembaga sehingga setiap anggota mendapatkan suatu pengetahuan yang lebih jauh. Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan karir dan Dinas Ketenagakerjaan
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) direkomendasikan membuat suatu pelatihan peningkatan karir dalam lembaga sehingga setiap anggota mendapatkan suatu pengetahuan terkait lembaga, desa, fungsi, dan manfaat Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan karir, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- d. Karang Taruna dalam bagian direkomendasikan suatu pelatihan peningkatan karir dalam lembaga sehingga setiap anggota mendapatkan suatu pengetahuan mengenai lembaga desa, fungsi dan manfaat. Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan karir, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga direkomendasikan suatu pelatihan peningkatan karir dalam lembaga sehingga setiap anggota mendapatkan suatu pengetahuan lembaga desa, fungsi, dan manfaat Pelatihan ini sebaiknya dilaksanakan oleh Lembaga pelatihan peningkatan karir, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kementrian Kesehatan.

8. Rekomendasi *Salaried Positions. Compensation* setiap anggota yang berada didalam lembaga masyarakat mendapatkan kompensasi atau honor berdasarkan pada performa kerja atau berdasarkan pada tugas-tugas yang dibebankan:

- a. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) direkomendasikan Pelatihan mengenai Manajemen Keuangan karena kelembagaan masih dalam proses pembentukan secara jelas oleh pemerintahan desa sehingga pendapatan kerja masih belum terlihat dengan jelas.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) direkomendasikan sebaiknya membuat sebuah dokumen tertulis yang mengatur tataan terhadap pembagian Kompensasi atau honor tambahan khususnya untuk setiap anggota yang dibebankan suatu tugas yang lebih dari kwajibannya karena sehingga anggota yang ada didalam lembaga tidak merasa terbebani.
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) direkomendasikan Pelatihan terkait manajemen keuangan. Yang nantinya kompensasi yang diberikan di ukur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa juga Standard Operasional Prosedur sehingga tertur dan adil disamping dari kompensasi yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang diberikan
- d. Karang Taruna dalam bagian direkomendasikan sebaiknya nanti membuat Pelatihan manajemen keuangan tataan terhadap pembagian Kompensasi atau honor tambahan khususnya untuk setiap anggota yang dibebankan suatu tugas yang lebih dari kwajibannya sehingga

anggota yang ada didalam lembaga tidak merasa terbebani disamping dari hal kenaikan posisi jabatan.

- e. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga direkomendasikan (TP.PKK) membuat pelatihan terkait dengan manajemen keuangan dan membuat tataan terhadap pembagian Kompensasi atau honor tambahan khususnya untuk setiap anggota yang dibebankan suatu tugas yang lebih dari kwajibannya sehingga anggota yang ada didalam lembaga tidak merasa terbebani dan juga menyesuaikan kembali dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Standard Operasional Prosedur. Pelaksana Dinas Keuangan dan Lembaga TP.PKK.

9. Rekomendasi Separation of “Official” and “Private” Income and duties. Lembaga masyarakat memilik kantor sekretariat:

Sejauh ini ke-4 (empat) lembaga masyarakat yang ada di Desa Tarumajaya sudah memiliki Sekretariat atau kantor dan juga rekening untuk lembaga. Tetapi mungkin, hal yang dapat direkomendasi terkait dengan kantor sekretariat yaitu melakukan perbaikan terhadap kebocoran sekretariat Karang taruna karena berdasarkan yang dilihat dilokasi adanya kebocoran terhadap atap di dalam ruangan dengan dilakukannya perbaikan atap, ini akan membuat kantor menjadi nyaman untuk anggota lembaga yang ada. Dan untuk Kelompok Sadar Wisata Belum memiliki kantor sendiri dikarenakan lembaga masih dalam proses pembentukan secara jelas jadi yang direkomendasikan yaitu pembangunan kantor sekretariat untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh Pemerintahan Desa.

10. Rekomendasi Kelembagaan

Kelembagaan yang ada di Desa Wisata Tarumajaya sebaiknya dikoordinasikan dalam satu lembaga yaitu Pengelolaan Desa Wisata (PDW). Dimana kelembagaan ini akan membantu dalam proses sinkronisasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kelembagaan yang ada di Desa Wisata Tarumajaya. sehingga permasalahan yang terdapat di Kelembagaan dapat diselesaikan dengan mudah terorganisir dengan baik dan juga program kegiatan Desa Wisata dapat berjalans secara Optimal. Dalam pengimplementasian Pengelola Desa Wisata (PDW) sebaiknya ini dikuatkan dengan suatu regulasi dengan minimal setingkat peraturan Desa dan bila dibutuhkan juga peraturan setingkat Kecamatan sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan suatu kolaborasi dengan Desa lainnya.

Gambar 35 Pengelolaan Desa Wisata



Tabel 1 Rekomendasi terhadap Lembaga masyarakat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
POKDARWIS					
1.	Hirarki atau struktur kelembagaan yang ada	1.Aspek pengaturan tataan yang didalamnya berkaitan dengan tugas-tugas atau tanggung jawab, fungsi, peran yang akan diberikan. Dan Strategi apa yang digunakan guna mencapai tujuan pengembagan desa wisata mandiri 2.Aspekl ini harus memiliki suatu misi tertentu terkait	Masih belum memiliki susuna struktur bagan kelembagaan	1.Pelatihan mengenai Struktur Lembaga 2.Pelatihan dan Pembuatan Model Kelembagaan	1. Pemerintah Desa. 2.Lembaga Pokdarwis

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
		dengan <i>problem prevention.</i>			
2.	Dokumen Tertulis terkait dengan kebijakan	<p>1.Aspek hak dari setiap anggota Pokdarwis dapat terjaga,</p> <p>2.Perlindungan anggota lembaga</p> <p>3. Pengambilan suatu keputusan dengan efisien</p> <p>4. Kenyamanan.</p> <p>5. Aspek landasan yang dapat mengatasi suatu permasalahan dan juga terkait dengan tugas-tugas anggota.</p>	Belum memiliki suatu kebijakan dan Standard Prosedur Operasional (SOP) yang tertulis	<p>1. Membuat Kebijakan yang mengatur pokdarwis</p> <p>2. Membuat Standar Prosedur Operasional (SOP)</p>	<p>Pemerintahan Desa membuat suatu pelatihan dari Lembaga Pelatihan Standard Operasional Prosedur seperti BMD Street Consulting dari PT.Bisa Mandiri dan mengajak Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat</p>

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
3.	Aturan-aturan formal dan regulasi pemerintah	Aspek Tertata	Belum memiliki aturan dan regulasi yang mengatur secara jelas mengenai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	.Membuat aturan ataupun regulasi yang mengikat Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)	1.Pemerintah Desa Wisata Tarumajaya 2.Lembaga masyarakat Pokdarwis 3.Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat
4.	<i>Specialization</i> pembagian kerja secara formal dituangkan dalam birokrasi dengan jabatan yang diatur berdasarkan pokok-pokok tugas yang dibebankan	Aspek sesuai dengan struktur lembaga pokdarwis, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, Standard Operasional prosedur (SOP) yang nantinya	Belum melakukan pembagian kerja dikarenakan tidak memiliki sebuah tataan tugas-tugas	Membuat susunan atau tataan terkait dengan pokok-pokok tugas diberikan	1.Pemerintah Desa Tarumajaya 2.Lembaga Pokdarwis

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
		sudah dibuat oleh tim penyusun dan kebijakan.			
5.	<i>Technical Knowledge</i> penempatan anggota yang ada didalam lembaga masyarakat memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan klasifikasi yang dibuat	1. Aspek kemampuan pengetahuan lembaga dan juga pengelolaan lembaga	Belum memiliki pengetahuan teknis yang ada di dalam lembaga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pelatihan dan Pembinaan mengenai pengetahuan teknis pengelolaan suatu lembaga	1. Pemerintahan Desa Tarumajaya 2. Dinas Tenaga Kerja
6.	<i>Impersonality</i> suatu tolak ukur anggota organisasi atau Lembaga masyarakat apakah mengikuti ketentuan prosedur dan kebijakan yang sudah dibuat	Aspek sesuai klasifikasi penempatan posisi yang telah ditentukan berdasarkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Masih dalam proses penyusunan prosedur tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa yang dibuat oleh Kepala Desa, kemudian itu sesuai dengan Standard Operasional prosedur (SOP)	Pembinaan dan pelatihan peningkatan kerja dalam lembaga pokdarwis	1. Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas kerja, Pemerintah Daerah 2. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
		Desa, Standard Operasional prosedur (SOP)	yang nantinya dibuat oleh tim penyusun.		Bandung Jawa Barat 3.Kemempu rekraf
7.	Career Employment peningkatan karir melalui promosi didasari dari <i>seniority, job performance, or increase training</i> :	Aspek pengajaran dan Pengetahuan	Masih dalam proses peyusunan lembaga secara legal`	1.Pembinaan dan pelatihan peningkatan karir dalam lembaga 2.Pembinaan dan pelatihan peningkatan kerja dalam lembaga pokdarwis	1.Lembaga pelatihan peningkatan karir 2. Dinas Tenaga Kerja 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.	<i>Salaried Positions. Compensation</i> setiap anggota yang berada didalam lembaga masyarakat mendapatkan kompensasi atau honor berdasarkan pada performa kerja atau berdasarkan pada tugas-tugas yang dibebankan	Aspek dasar pengolahan keuangan Dan Aspek Pengendalian keuangan	Masih dalam proses pembentukan secara jelas	Pelatihan mengenai Manajemen Keuangan	1. Lembaga Pelatihan Manajemen Keuangan 2.Dinas Keuangan

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
9.	Separation of “Official” and “Private” <i>Income and duties</i> . Lembaga masyarakat memilik kantor sekretariat terpisah dari urusan perkantoran dengan lingkup kehidupan pribadi dari anggota:	Aspek Gedung kantor	Belum memiliki kantor sendiri dikarenakan lembaga masih dalam proses pembentukan secara jelas	Pembangunan kantor sekretariat untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Pemerintahan Desa Tarumajaya
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)					
1.	Hirarki atau struktur kelembagaan yang ada	-	-	-	-
2.	Dokumen Tertulis terkait dengan kebijakan	Aspek Tata cara pembuatan Standard Operasional Prosedur yang sesuai dan terkait dengan manajemen resiko	Standard Operasional Prosedur dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Wisata Tarumajaya masih memiliki beberapa kekurangan seperti masih belum adanya	1.Pelatihan terkait penyusunan Standard Operasional Prosedur dan 2.Menambahk an <i>problem prevention</i> yang tegas didalam Standard	Pemerintahan Desa membuat suatu pelatihan dari Lembaga Pelatihan Standard Operasional Prosedur seperti

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
			sebuah <i>problem prevention</i> yang tegas didalamnya	Prosedur Operasional	BMD Street Consulting dari PT.Bisa Mandiri dan mengajak Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat
3.	Aturan-aturan formal dan regulasi pemerintah	Regulasi umum telah ada secara lengkap oleh pemerintah	Regulasi spesifik yang khusus mengatur pengembangan desa wisata	Membuat Musyawarah Desa untuk melakukan penyusunan regulasi tat hubungan unit usaha pelaksanaan pengembangan desa wisata Tarumajaya	1.Pemerintah Desa Wisata Tarumajaya 2.Lembaga masyarakat BUMDesa 3.Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
4.	<i>Specialization</i> pembagian kerja secara formal dituangkan dalam birokrasi dengan jabatan yang diatur berdasarkan pokok-pokok tugas yang dibebankan	Secara umum sudah pembagian unit usaha di BUM Desa	Perlu peningkatan kapasitas pengelola unit usaha kepariwisataan	Membuat pembatasan tugas dan fungsi, serta tata hubungan antar unit usaha dalam mengembangkan Desa Wisata	BUM Desa, Pemerintah
5.	<i>Technical Knowledge</i> penempatan anggota yang ada didalam lembaga masyarakat memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan klasifikasi yang dibuat	Aspek Keterampilan anggota, Keterampilan <i>Director</i> dan <i>maneger</i> unit.	Masih memegang teguh terhadap pemberdayaan dan kemauan seseorang untuk menjadi bagian dari lembaga tanpa melihat kemampuan teknis yang sesuai untuk kualifikasi dalam lembaga	1. Pelatihan lembaga kemasyarakatan 2. Menyesuaikan kembali dengan kualifikasi pemenuhan posisi jabatan tertentu didalam lembaga masyarakat	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat 3. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
6.	<i>Impersonality</i> suatu tolak ukur anggota organisasi atau Lembaga masyarakat apakah mengikuti ketentuan prosedur dan kebijakan yang sudah dibuat	Aspek Kualitas Lembaga dan Anggota	Masih belum jelas secara prosedur yang ada	Pelatihan terkait dengan Produktivitas dalam lembaga	1.Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas kerja, Pemerintah Daerah 2. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat 3.Kemenpa rekras
7.	Career Employment peningkatan karir melalui promosi didasari dari <i>seniority</i> , <i>job performance</i> , or <i>increase training</i> :	Aspek Pengetahuan terkait lembaga desa, fungsi, dan manfaat		Pelatihan peningkatan karir dalam lembaga	1.Lembaga pelatihan peningkatan karir 2.Dinas Tenaga Kerja 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
8.	<i>Salaried Positions. Compensation</i> setiap anggota yang berada didalam lembaga masyarakat mendapatkan kompensasi atau honor berdasarkan pada performa kerja atau berdasarkan pada tugas-tugas yang dibebankan	Aspek Manajemen Keuangan	Masih belum adanya sebuah dokumen tertulis yang mengatur tataan terhadap pembagian kompensasi atau honor tambahan	1.Pelatihan terkait manajemen keuangan 2.Membuat sebuah dokumen tertulis yang mengatur tataan terhadap pembagian Kompensasi atau honor	1.Dinas Keuangan 2.BUM Desa
9.	<i>Separation of "Official" and "Private" Income and duties.</i>	Sudah tersedia kantor BUM Desa	Bila unit usaha pengembangan kepariwisataan berkembang pesat perlu memisahkan kantornya dari unit usaha lainnya	Pengembangan kantor berbasis digitalisasi dengan memanfaatkan TIK	BUM Desa
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DESA TARUMAJAYA					
1.	Hirarki atau struktur kelembagaan yang ada	-	-	-	-
2.	Dokumen Tertulis terkait	Aspek Tata cara pembuatan Standard Operasional Prosedur	Masih belum memiliki suatu dokumen tertulis berkaitan dengan kebijakan dari lembaga	1. Pelatihan mengenai Pelatihan Standard Prosedur	Pemerintahan Desa membuat suatu pelatihan dari

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
	dengan kebijakan	yang sesuai dan terkait dengan manajemen resiko		Operasional (SOP) 2.Membuat dokumen tertulis terkait dengan kebijakan tertulis disamping dari suatu kebijakan yang tidak tertulis atau yang sudah menjadi aturan dan kearifan lokal masyarakat	Lembaga Pelatihan Standard Operasional Prosedur seperti BMD Street Consulting dari PT.Bisa Mandiri dan mengajak Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat
3.	Aturan-aturan formal dan regulasi pemerintah	Tersedia regulasi umum MUI	Sudah ada aturan umum	Membuat aturan pengembangan desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan pengembangan mental spiritual masyarakat	1.Pemerintah Desa Wisata Tarumajaya 2.Lembaga masyarakat MUI 3.Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
4.	<i>Specialization</i> pembagian kerja secara formal dituangkan dalam birokrasi dengan jabatan yang diatur berdasarkan pokok-pokok tugas yang dibebankan	-	Sudah ada pembagian tugas yang dibebankan namun belum termasuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, Standard Operasional prosedur (SOP	Membuat susunan atau tataan terkait dengan pokok-pokok tugas dibebankan sesuai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, Standard Operasional prosedur (SOP)	Pemerintahan Desa dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia Desa Tarumajaya
5.	<i>Technical Knowledge</i> penempatan anggota yang ada didalam lembaga masyarakat memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan klasifikasi yang dibuat	.	MUI belum termasuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, dan belum memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP)	1. Pelatihan lembaga kemasyarakatan 2. Menyesuaikan kembali dengan kualifikasi pemenuhan posisi jabatan tertentu didalam lembaga masyarakat	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
6.	<i>Impersonal</i> ity suatu tolak ukur anggota organisasi atau Lembaga masyarakat apakah mengikuti ketentuan prosedur dan kebijakan yang sudah dibuat	Aspek Kualitas Lembaga dan Anggota	Masih belum jelas secara prosedur yang ada	Pelatihan terkait dengan Produktivitas Kerja dalam lembaga	1.Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas kerja, Pemerintah Daerah 2. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat 3.Kemempare kraf
7.	Career Employment peningkatan karir melalui promosi didasari dari <i>seniority, job performance, or increase training:</i>	Aspek Pengetahuan terkait lembaga desa, fungsi, dan manfaat	Masih menekankan terhadap loyalitas dan performa kerja	Pelatihan peningkatan karir dalam lembaga	1.Lembaga pelatihan peningkatan karir 2.Dinas Tenaga Kerja 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
8.	<i>Salaried Positions. Compensation</i> setiap anggota yang berada didalam lembaga masyarakat mendapatkan kompensasi atau honor berdasarkan pada performa kerja atau berdasarkan pada tugas-tugas yang dibebankan	Aspek Manajemen Keuangan	Masih belum ada suatu pembagian kompensasi terhadap anggota lembaga dengan jelas	1.Pelatihan terkait manajemen keuangan 2Membuat sebuah dokumen tertulis yang mengatur tataan terhadap pembagian Kompensasi atau honor	1.Dinas Keuangan 2.Lembaga MUI
9.	Separation of “Official” and “Private” <i>Income and duties.</i>	Telah memiliki kantor	Sarana prasarana terbatas, dengan bangunan kantor sederhana	Memanfaatkan TIK dalam mengembangkan kantor berbasis digital sambil melakukan pembenahan kelengkapan sarana prasarana	MUI, Pemerintah serta berbagai pihak eksternal

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
KARANG TARUNA					
1.	Hirarki atau struktur kelembagaan yang ada	Sudah ada struktur lembaga	Pembagian peran masing-masing pengurus dalam struktur	Peningkatan kapasitas dengan pelatihan tata Kelola organisasi/lembaga	Karang Taruna bekerjasama Pentahelix dengan eksternal desa
2.	Dokumen Tertulis terkait dengan kebijakan	Aspek Tata cara pembuatan Standard Operasional Prosedur yang sesuai dan terkait dengan manajemen resiko	Masih belum memiliki Standard Prosedur Operasional (SOP)	1. Pelatihan mengenai Standard Prosedur Operasional (SOP) 2. Membuat dokumen tertulis terkait dengan membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) disamping dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Pemerintahan Desa membuat suatu pelatihan dari Lembaga Pelatihan Standard Operasional Prosedur seperti BMD Street Consulting dari PT.Bisa Mandiri dan mengajak Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
3.	Aturan-aturan formal dan regulasi pemerintah	Sudah tersedia regulasi formal sederhana	Pembagian tugas dan tata hubungan antar lembaga untuk mengembangkan desa wisata	Melaksanakan peningkatan kapasitas dalam pembuatan regulasi tata hubungan dengan lembaga lain	1.Pemerintah Desa Wisata Tarumajaya 2.Lembaga masyarakat Karang Taruna 3.Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat
4.	<i>Specialization</i> pembagian kerja secara formal dituangkan dalam birokrasi dengan jabatan yang diatur berdasarkan pokok-pokok tugas yang dibebankan	Pembagian kerja umum	Sudah ada pembagian tugas yang dibebankan namun belum termasuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, Standard Operasional prosedur (SOP	Membuat susunan atau tataan terkait dengan pokok-pokok tugas dibebankan sesuai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Desa, Standard Operasional prosedur (SOP)	Pemerintahan Desa dan Lembaga Karang Taruna Desa Tarumajaya
5.	<i>Technical Knowledge</i>	.	Masih bergantung sesuai dengan	1. Pelatihan lembaga	.Dinas Pemberdayaa

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
	penempatan anggota yang ada di dalam lembaga masyarakat memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan klasifikasi yang dibuat		latar belakang dan kebiasaan anggota	kemasyarakatan 2. Pelatihan dan pembinaan mengenai pengetahuan teknis pengelolaan lembaga	n Masyarakat dan Desa Prov.Jawa Barat
6.	<i>Impersonal</i> suatu tolak ukur anggota organisasi atau Lembaga masyarakat apakah mengikuti ketentuan prosedur dan kebijakan yang sudah dibuat	Aspek Kualitas Lembaga dan Anggota	Masih belum jelas secara prosedur yang ada	Pelatihan terkait dengan Produktivitas Kerja dalam lembaga	1.Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas kerja, Pemerintah Daerah 2. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat 3.Kememparekraf
7.	Career Employment peningkatan	Aspek Pengetahuan terkait lembaga	Masih belum jelas terhadap prosedur yang ada dalam lembaga	Pelatihan peningkatan karir dalam lembaga	1.Lembaga pelatihan peningkatan karir

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
	n karir melalui promosi didasari dari <i>seniority, job performance, or increase training:</i>	desa, fungsi, dan manfaat			2.Dinas Tenaga Kerja 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
8.	<i>Salaried Positions. Compensation</i> setiap anggota yang berada didalam lembaga masyarakat mendapatkan kompensasi atau honor berdasarkan pada performa kerja atau berdasarkan pada tugas-tugas	Aspek Manajemen Keuangan	Masih belum ada suatu tataan pembagian kompensasi terhadap anggota lembaga dengan jelas	.1Pelatihan terkait manajemen keuangan 2. Membuat sebuah dokumen tertulis yang mengatur tataan terhadap pembagian Kompensasi atau honor	1.Dinas Keuangan 2.Lembaga Karang Taruna

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
	yang dibebankan				
9.	Separation of “Official” and “Private” <i>Income and duties.</i>	Aspek Kenyamanan Bekerja	Sudah memiliki kantor sendiri tetapi sayangnya butuh sedikit renovasi	Perbaikan terhadap kantor karang taruna	Pemerintahan Desa Tarumajaya
TP.PKK DESA TARUMAJAYA					
1.	Hirarki atau struktur kelembagaan yang ada	Sudah ada struktur	Pemahaman tugas fungsi secara spesifik masing untuk mengembangkan desa wisata	Pelatihan peningkatan peran PKK dalam mengembangkan desa wisata Tarumajaya	TP.PKK Bersama pemerintah dan unsur pentahelix lainnya
2.	Dokumen Tertulis terkait dengan kebijakan	Aspek Tata cara pembuatan Standard Operasional Prosedur yang sesuai dan terkait dengan manajemen resiko	Masih belum memiliki Standard Prosedur Operasional (SOP)	1. Pelatihan mengenai Standard Prosedur Operasional (SOP) 2. Membuat dokumen tertulis terkait dengan membuat Standard Prosedur Operasional (SOP) disamping dari Anggaran	Pemerintahan Desa membuat suatu pelatihan dari Lembaga Pelatihan Standard Operasional Prosedur seperti BMD Street Consulting dari PT.Bisa Mandiri dan mengajak

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
				Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat
3.	Aturan-aturan formal dan regulasi pemerintah	Sudah ada secara umum	Aturan khususnya petunjuk tata hubungan dan peran PKK dalam mengembangkan desa wisata	Pelatihan dan workshop penyusunan aturan tata hubungan dan peran lembaga PKK dalam pengembangan desa wisata	1.Pemerintah Desa Wisata Tarumajaya 2.Lembaga masyarakat TP.PKK 3.Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat
4.	<i>Specialization</i> pembagian kerja secara formal dituangkan dalam birokrasi dengan jabatan yang diatur berdasarkan pokok-	Sudah ada pembagian kerja	Secara umum tersedia pembagian kerja, namun untuk peran khusus TP.PKK dalam mengembangkan Desa Wisata Tarrumajaya belum dibagi secara spesifik	Pelatihan dan workshop pembagian kerja TP PKK dalam mendukung pengembangan desa wisata -	TP PKK dan semua pihak pentahelix

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
	pokok tugas yang dibebankan				
5.	<i>Technical Knowledge</i> penempatan anggota yang ada di dalam lembaga masyarakat memiliki kemampuan teknis yang sesuai dengan klasifikasi yang dibuat	Masih berlatar belakang Pendidikan umum	Masih bergantung sesuai dengan latar belakang dan kebiasaan anggota	1. Pelatihan lembaga kemasyarakatan 2. Pelatihan dan pembinaan mengenai pengetahuan teknis pengelolaan lembaga dan pengembangan desa wisata	.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov.Jawa Barat
6.	<i>Impersonality</i> suatu tolak ukur anggota organisasi atau Lembaga masyarakat apakah mengikuti ketentuan prosedur dan kebijakan yang sudah dibuat	Aspek Kualitas Lembaga dan Anggota	Masih belum jelas secara prosedur yang ada. Belum ada tata hubungan antar lembaga secara khusus yang bertujuan untuk mengembangkan desa wisata	Pelatihan terkait dengan Produktivitas Kerja dalam lembaga	1.Lembaga pelatihan peningkatan produktivitas kerja, Pemerintah Daerah 2. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bandung Jawa Barat 3.Kememparekraf

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
7.	Career Employment peningkatan karir melalui promosi didasari dari <i>seniority, job performance, or increase training:</i>	Aspek Pengetahuan terkait lembaga desa, fungsi, dan manfaat	Masih belum jelas terhadap prosedur yang ada dalam lembaga	Pelatihan dan pembinaan peningkatan karir dalam lembaga	1.Puskesmas 2.Kementrian Kesehatan 3.Dinas kesehatan 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
8.	<i>Salaried Positions. Compensation</i> setiap anggota yang berada didalam lembaga masyarakat mendapatkan kompensasi atau honor berdasarkan pada performa	Aspek Manajemen Keuangan	Masih belum ada suatu tataan pembagian kompensasi terhadap anggota lembaga dengan jelas	.1Pelatihan terkait manajemen keuangan 2. Membuat tataan terhadap pembagian Kompensasi atau honor tambahan khususnya untuk setiap anggota	1.Dinas Keuangan 2.Lembaga TP.PKK

BAGIAN	ASPEK PENINGKATAN	MASALAH YANG DITEMUKAN	HAL YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN	PELAKSANA	BAGIAN
	kerja atau berdasarkan pada tugas-tugas yang dibebankan				
9.	Separation of “ <i>Official</i> ” and “ <i>Private</i> ” <i>Income and duties.</i>	Tersedia ruang kantor	Kantor sederhana dengan sarana prasarananya	Pengembangan ruang kantor berbasis digitalisasi untuk mendukung peran PKK dalam pengembangan Desa Wisata	TP PKK, Pemerintah desa, Lembaga Masyarakat lainnya, Media TIK, Perguruan Tinggi Akademisi, swasta